

PENCEGAHAN *FRAUD*: KOMPENSASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Mys. Friska Allysa¹⁾, Periansya Periansya²⁾, Yuliana Sari³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Corresponding author: periansya@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi dan Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* melalui *Good Government Governance* sebagai Variabel Intervening. Populasi dalam penelitian ini yaitu 117 pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan teknik pemilihan sampel yaitu *simple random sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner dengan respon penelitian berjumlah 54 pegawai di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 2.9. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kompensasi terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Good Government Governance*, Kompetensi tidak terdapat pengaruh terhadap *Good Government Governance*, secara simultan kompensasi dan kompetensi terdapat pengaruh terhadap *Good Government Governance*, Kompensasi tidak terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*, Kompetensi tidak terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*, secara tidak langsung Kompensasi dan Kompetensi mempengaruhi Pencegahan *Fraud* melalui *Good Government Governance* sebagai Variabel Intervening.

Kata Kunci: Kompensasi, Kompetensi, *Good Government Governance*, dan Pencegahan *Fraud*.

Abstract

This research aims to determine the effect of Compensation and Competency on Fraud Prevention through Good Government Governance as an Intervening Variable. The population in this study were 117 employees of the South Sumatra Provincial Inspectorate with a sample selection technique of simple random sampling. This research is a quantitative study using primary data, namely a questionnaire with a research response of 54 employees at the South Sumatra Provincial Inspectorate. Data analysis used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 2.9 program. The results of this research explain that Compensation has a negative and significant effect on Good Government Governance, Competence has no effect on Good Government Governance, simultaneously compensation and competence have an effect on Good Government Governance, Compensation has no effect on Fraud Prevention, Competence has no effect on Fraud Prevention, indirectly Compensation and Competence affect Fraud Prevention through Good Government Governance as an Intervening Variable.

Keywords: Compensation, Competence, *Good Government Governance*, and Fraud Prevention.

1. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan alat eksekutif atau pelaksana dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Pemerintah membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan efektif dan efisien, guna meningkatkan pelayanan publik. Namun faktanya, masih terdapat banyak aparatur instansi pemerintah pada tingkat pusat ataupun daerah, yang terlibat dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). (Permana et al., 2017). Beberapa kasus menunjukkan bahwa

beberapa oknum sering menyalahgunakan OPD untuk tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan lainnya.

Salah satu kasus *fraud* yang terjadi di Pemerintah Sumatera Selatan terjadi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Inspektur Pembantu Investigasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi sebagai tersangka kasus gratifikasi dengan menerima hadiah atau janji yang behubungan karena jabatan dengan cara mengatasnamakan kejaksaan, tersangka dituntut dengan dua tahun penjara dan denda Rp50.000.000

dengan alternatif 3 bulan kurungan (Irawan, 2024).

Fraud dapat terjadi karena kurangnya kompensasi yang diterima oleh pegawai, hal tersebut dapat memicu dorongan untuk mencari cara yang tidak jujur demi memperoleh penghasilan lebih. Kompensasi harus dikelola secara efektif agar tidak menimbulkan ketidakpuasan pegawai yang pada akhirnya akan menimbulkan kecurangan (Mujanah, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik keseimbangan kompensasi dengan kinerja pegawai, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan pada instansi pemerintah (Permana et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Egita & Mahfiroh (2018) menemukan bahwa salah satu metode pencegahan kecurangan adalah dengan memastikan kesesuaian dalam kompensasi pegawai.

Selain itu, tingkat kompetensi juga dapat berperan dalam memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan (Sari & Musmini, 2022). Pegawai wajib mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai demi menyelesaikan tugasnya dengan efektif, serta mempunyai kemampuan untuk mencegah tindakan penipuan, agar dapat menjaga integritas dan kepercayaan dalam lingkungan kerja. Saat pegawai melakukan tindakan untuk melaksanakan tugas harus mempunyai pengetahuan yang memadai agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta memiliki keterampilan untuk menghindari kecurangan (*fraud*) yang bisa merugikan berbagai pihak (Rukayyah dkk., 2023).

Berbagai kasus korupsi di sektor publik menyebabkan kerugian perekonomian negara yang signifikan dan merugikan masyarakat. Maka dari itu, sistem efektif diperlukan untuk memberantas *fraud*, yaitu dengan mengimplementasikan *good government governance* sebagai pengukur bagi entitas apakah dikelola secara baik dan tepat sesuai peraturan yang ditetapkan (Widyawati dkk., 2023). *Good government governance* merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat (Prameswari dkk., 2022). Prinsip-prinsip tersebut ditargetkan untuk mencegah

seseorang di entitas untuk tidak terlibat dalam praktik kecurangan.

Studi sebelumnya mengenai kompetensi terhadap pencegahan *fraud* memberikan hasil akan adanya inkonsistensi. Studi oleh Widyawati dkk., (2023) memberikan hasil yaitu kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sementara, studi dari (Yufitrianisa dkk., 2022) memberikan hasil berupa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penambahan variabel intervening yaitu *good government governance* agar dapat menjadi solusi dari inkonsistensi pengaruh antara kompensasi dan kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya dan fenomena saat ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dengan *good government governance* sebagai variabel intervening.

2. TELAHAH LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini awalnya ditemukan Jensen & Meckling saat 1976. Teori ini merupakan hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dan pelaksana (*agent*). Perbedaan kepentingan antara keduanya sering menyebabkan konflik keagenan dan asimetri informasi.

Konsep *Good Government Governance* dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut yang bertujuan meningkatkan kesehatan entitas dan berperan krusial dalam menyeimbangkan kepentingan *principal* dan *agent* serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan entitas. Teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan dapat diatasi melalui kompensasi yang tepat untuk mendorong *agent* bertindak sesuai tujuan sebuah entitas. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol guna mencegah kecurangan serta menguraikan lemahnya *good government governance* dapat meningkatkan risiko kecurangan akibat ketidaksejajaran kepentingan dari *agent* dan *principal*, yang dapat mendorong perilaku oportunistik dari *agent* (Rabiultsani, 2022).

Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* awalnya ditemukan Wolfe & Hermanson saat 2004.

Teori ini adalah kerangka teori yang menguraikan penyebab terjadinya *fraud* yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Teori ini adalah optimalisasi dari teori *fraud triangle*.

Kesadaran akan kecurangan berperan penting dalam mempengaruhi secara positif perilaku individu yang berada di bawah tekanan dan mempunyai peluang, alasan rasional, kesempatan, dan kemampuan untuk melakukan kecurangan. Sehingga, implementasi tata kelola pemerintah yang baik sangat penting untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan dan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika dan menjauhi perilaku yang tidak etis. Menurut teori *fraud diamond*, kecurangan dapat terjadi saat pelaku berada di situasi dengan tekanan dan peluang yang tinggi, terutama jika pelaku memiliki integritas rendah. Maka, dengan penerapan tata kelola pemerintah yang baik, peluang untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir (Dewata dkk., 2022)

Kompensasi

Menurut Masram & Muah (2017), kompensasi merupakan segala bentuk imbalan yang diterima pegawai atas tugas yang telah diselesaikan. Kompensasi yang sesuai dapat memberikan ketenangan pegawai serta membantu entitas dalam mendapatkan, mempekerjakan, dan mempertahankan pegawai. Kompensasi berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kerja pegawai dan mempertahankan pegawai dalam sebuah entitas. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kompensasi langsung yang meliputi gaji, komisi, upah, dan bonus, serta kompensasi tidak langsung yang mencakup bentuk kesejahteraan bagi pegawai.

Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, pengetahuan kompetensi yaitu kualitas atau keahlian seorang pegawai dalam pemerintah mencakup pemahaman, keahlian, dan sifat untuk menjalankan tugasnya. Fokus utamanya adalah agar para pegawai mampu menjalankan tugasnya dengan tingkat profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi yang tinggi. Kompetensi dianggap setara

dengan kemampuan, maka menunjukkan bahwa pemahaman akan tujuan pekerjaan, keahlian dalam menjalankan tugas dengan tepat, dan penghargaan terhadap kedisiplinan dalam konteks entitas untuk menjalankan prosedur dan peraturan dengan lancar. Menurut Gordon dalam Sutrisno (2016) indikator yang terdapat dalam kompetensi meliputi pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Good Government Governance

Menurut Djalil (2018), *good governance* merupakan pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip tata kelola transparan dan bersih di sebuah entitas dengan harapan masyarakat agar memberikan layanan publik dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan mampu mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terdapat 9 prinsip *good government governance* menurut Mardiasmo (2018), yaitu partisipasi, kerangka hukum, transparansi, responsive, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategis.

Pencegahan Fraud

Menurut Nugroho (2015), pencegahan *fraud* merupakan perbuatan atau langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya semua jenis kecurangan atau perilaku kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Upaya ini bertujuan untuk mencegah kecurangan agar tidak terjadi di entitas, sehingga tujuan entitas dapat tercapai dan reputasi entitas dapat ditingkatkan. Tujuan pencegahan *fraud* terdiri dari pencegahan, penggentaran, penggangguan, identifikasi, dan tuntutan hukum sipil (Pratiwi, 2016). Dengan mengimplementasikan tujuan ini secara efektif, sebuah entitas dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani *fraud* dengan lebih efisien.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori terkait dengan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini mencakup 7 hipotesis, yaitu:

1. Besaran kompensasi yang diberikan tidak akan mencapai hasil yang efektif dalam

mencegah penipuan, bahkan bisa jadi tidak ada hasilnya jika implementasi *good government governance* tidak memadai. Hal ini relevan dengan studi oleh Neokleous (2017) yang menunjukkan bahwa kompensasi yang tinggi akan memotivasi pegawai untuk mengambil risiko berlebihan dan melakukan kecurangan apabila penerapan *good government governance* tidak memadai. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₁ : Kompensasi diduga berpengaruh terhadap *good government governance*.

2. Kompetensi sumber daya manusia memadai mendukung implementasi *good government governance* optimal. Prinsip akuntabilitas dalam *good government governance* memastikan semua individu memiliki kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan kewajibannya, sehingga memiliki kompetensi yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai. Hal ini relevan dengan studi oleh Wafa dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh positif dengan *good governance*. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi diduga berpengaruh terhadap *good government governance*.

3. Kompensasi terhadap kinerja sebuah entitas dipengaruhi oleh tingkat implementasi *good government governance* (Ruhanda, 2018). Dengan implementasi tata kelola yang baik, entitas dapat memastikan kebijakan kompensasi yang diterapkan adil dan kompetitif serta selaras dengan prinsip. Sumber daya manusia yang kompeten memastikan bahwa penerapan tata kelola yang baik diimplementasikan secara efektif. Hal ini relevan dengan studi oleh Muslih (2018) dan Budiningsih dkk. (2016) yang menjelaskan bahwa kompensasi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₃ : Kompensasi dan kompetensi diduga berpengaruh terhadap *good government governance*.

4. Kompensasi memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Ketika

pegawai merasa bahwa kebutuhan telah terpenuhi melalui kompensasi yang diterima akan terdorong untuk menjalankan tugas dengan lebih optimal dan lebih mematuhi aturan serta prosedur yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan *fraud*. Hal ini relevan dengan studi oleh Sunaryo (2019) yang menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₄ : Kompensasi diduga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

5. Kompetensi menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam mencegah *fraud*. Kinerja yang kurang optimal akibat kemampuan yang terbatas dapat memicu masalah, termasuk terjadinya kecurangan. Hal ini relevan dengan studi oleh Widyawati dkk. (2023) dan Rukayyah dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₅ : Kompetensi diduga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

6. Semakin efektif penerapan *good government governance*, semakin tinggi kemungkinan untuk mencegah kecurangan. Implementasi *good government governance* melalui transparansi, akuntabilitas, independensi, dan partisipasi yang kuat di dalam entitas merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini relevan dengan studi oleh Inawati & Sabila (2021) yang menjelaskan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₆ : *Good Government Governance* diduga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

7. Kurangnya wawasan sumber daya manusia mengenai prinsip *good government governance* menghambat efektivitas penerapannya. Peningkatan pemahaman kompetensi diharapkan agar dapat menghindari terjadinya *fraud*. Hal

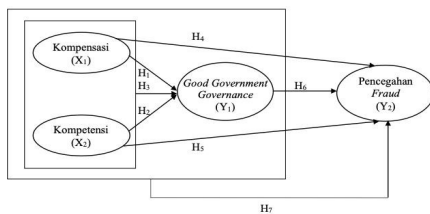
ini relevan dengan studi oleh Widyawati dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* melalui *good corporate governance*. Mengacu pada hal tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₇ : Kompensasi dan kompetensi melalui *good government governance* diduga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang mengilustrasikan hubungan antara hipotesis dan faktor-faktor yang penting dan mendasar, serta menjadi landasan ilmiah dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2022).

Untuk merumuskan sebuah hipotesis, diperlukan paradigma penelitian yang dapat menggambarkan pengaruh variabel Kompensasi dan Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* melalui *Good Government Governance* sebagai variabel intervening. Kerangka penelitian ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X₁ = Kompensasi

X₂ = Kompetensi

Y₁ = *Good Government Governance*

Y₂ = Pencegahan *Fraud*

Menurut kerangka pemikiran tersebut, berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini.

H₁ = Kompensasi berpengaruh terhadap *Good Government Governance*

H₂ = Kompetensi berpengaruh terhadap *Good Government Governance*

H₃ = Kompensasi dan Kompetensi berpengaruh terhadap *Good Government Governance*

H₄ = Kompensasi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*

H₅ = Kompetensi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*

H₆ = *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*

H₇ = Kompensasi dan Kompetensi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* melalui *Good Government Governance* sebagai Variabel Intervening

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan yaitu kuantitatif yang dirancang untuk mengukur pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung variabel kompensasi dan kompetensi terhadap pencegahan *fraud* melalui *good government governance* sebagai variabel intervening.

Populasi dan Sampel

Seluruh pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu dengan jumlah 117 pegawai dan sampel yang digunakan berdasarkan *simple random sampling* yaitu 54 pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum pada tabel 1.

Tabel 1

Sampel Penelitian

No.	Nama Bagian	Jumlah sampel
1	Struktural	5
2	Umum dan Kepegawaian	4
3	Keuangan	5
4	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5
5	Inspektur Pembantu I	6
6	Inspektur Pembantu II	5
7	Inspektur Pembantu III	5
8	Inspektur Pembantu IV	5
9	Inspektur Investigasi	4
10	Honorer	10
Jumlah		54

Sumber: Penulis, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diterapkan menggunakan kuesioner, terdiri dari 59 butir pernyataan yang diberikan untuk pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Semua variabel diukur menggunakan skala interval yang diukur dengan skala likert dengan 5 tingkat, yaitu ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2

Skala Likert

Jawaban	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2022

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan bantuan melalui *software* SPSS 2.9 untuk mendapatkan hasil yang akurat terhadap hasil kuesioner. Terdapat enam uji yang dilakukan uji yakni instrumen penelitian, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta analisis jalur.

Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen, yaitu Pencegahan *Fraud*, dua variabel independen, yaitu Kompensasi dan Kompetensi, dan satu variabel intervening, yaitu *Good Government Governance*.

Kompensasi menggunakan dimensi dari (Masram & Muah, 2017) yaitu *financial* dan *non financial*. Kompetensi menggunakan dimensi dari (Sutrisno, 2016) yaitu Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan, dan Sikap. *Good Government Governance* menggunakan dimensi dari (Mardiasmo, 2018) yaitu Partisipasi, Kerangka Hukum, Responsif, Transparansi, Berorientasi pada Konsensus, Efisiensi dan Efektifitas, Akuntabilitas, Kesetaraan, dan Visi Strategis. Pencegahan *fraud* menggunakan dimensi dari (Widyawati dkk., 2023) yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan, demokratis, serta tertib administrasi dan pelaporan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi Pengembalian Kuesioner

Dari sebanyak 54 kuesioner yang disebar, keseluruhan jumlah kuesioner telah kembali atau sebanyak 100%. Gambaran mengenai data sampel dari hasil penyebaran kuesioner disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Distribusi Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	54	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
	Jumlah kuesioner yang kembali	54	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Karakteristik Responden

Karakteristik profil responden dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikut ini disajikan deskripsi mengenai identitas dan karakteristik responden pada tabel 5.

Tabel 5
Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	27	50%
	b. Perempuan	27	50%
	Total	54	100%
2.	Usia		
	a. 20-30 Tahun	0	0%
	b. 31-40 Tahun	9	16,7%
	c. 41-50 Tahun	31	57,4%
	d. > 50 Tahun	14	25,9%
	Total	54	100%
3.	Pendidikan Terakhir		
	a. D1	0	0%
	b. D3	2	3,7%
	c. D4/S1	28	51,9%
	d. Lainnya	24	44,4%
	Total	54	100%
4.	Jabatan		
	a. Struktural	4	7,4%
	b. Umum dan Kepegawaian	7	13%
	c. Keuangan	8	14,8%
	d. Perencanaan Evaluasi dana Pelaporan	3	5,5%
	e. Inspektur Pembantu I	10	18,5%
	f. Inspektur Pembantu II	4	7,4%
	g. Inspektur Pembantu III	5	9,3%
	h. Inspektur Pembantu IV	7	13%
	i. Inspektur Investigasi	6	11,1%
	Total	54	100%
5.	Lama Bekerja		
	a. 1-5 Tahun	1	1,9%
	b. 5-15 Tahun	26	48,1%
	c. > 15 Tahun	27	50%
	Total	54	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Persamaan 1)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	128.999	15.626		8.255	<.001
	Kompensasi	-.925	.357	-.465	-2.595	.012
	Kompetensi	.440	.374	.211	1.178	.244

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024. Diperoleh persamaan sebagai berikut menurut tabel tersebut:

$$Y = 128,999 - 0,925X_1 + 0,440X_2 + e$$

1. Konstanta sebesar 128,999 bernilai positif menunjukkan bahwa apabila kompensasi dan kompetensi nilainya 0, maka besarnya penerapan *good government governance* memiliki nilai positif sebesar 128,999.
2. Koefisien regresi kompensasi (X_1) = -0,925 menunjukkan hubungan negatif antara kompensasi dan *good government governance* yang berarti setiap peningkatan kompensasi 1% dengan anggapan variabel lain konstan, maka mengakibatkan penurunan *good government governance* sebesar 0,925 atau 92,5%.
3. Koefisien regresi kompetensi (X_2) = 0,440 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompetensi 1% dengan anggapan variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan kenaikan *good government governance* sebesar 0,440 atau 44%.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
(Persamaan 2)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.753	4.475		2.403	.020
	Kompensasi	.001	.071	.003	.020	.984
	Kompetensi	.031	.071	.052	.432	.668
	Good Government Governance	.222	.026	.791	8.462	<.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024. Diperoleh persamaan sebagai berikut menurut tabel tersebut:

$$Y = 10,753 + 0,001X_1 + 0,031X_2 + 0,222Y_1 + e$$

1. Konstanta sebesar 10,753 bernilai positif menunjukkan bahwa apabila kompensasi dan kompetensi nilainya 0, maka besarnya pencegahan *fraud* memiliki nilai positif sebesar 10,753.
2. Koefisien regresi kompensasi (X_1) = 0,001 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompensasi 1% dengan anggapan variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan kenaikan pencegahan *fraud* sebesar 0,001 atau 0,1%.
3. Koefisien regresi kompetensi (X_2) = 0,031 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompetensi 1% dengan anggapan variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan kenaikan pencegahan *fraud* sebesar 0,031 atau 3,1%.
4. Koefisien regresi good government governance (Y_1) = 0,222 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *good government governance* 1% dengan anggapan variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan kenaikan pencegahan *fraud* sebesar 0,222 atau 22,2%.

Uji Hipotesis
Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi (Persamaan 1)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.356 ^a	.127	.092	9.294

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Kompensasi
b. Dependent Variable: Good Government Governance

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi (Persamaan 2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.596	1.741

a. Predictors: (Constant), Good Government Governance, Kompetensi, Kompensasi
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

Pada persamaan 1, didapatkan koefisien determinasi dengan nilai 0,127. Ini mengindikasikan variabel Kompensasi dan

Kompetensi mempengaruhi 12,7% variabel *Good Government Governance*.

Pada persamaan 2, didapatkan koefisien determinasi dengan nilai 0,618. Ini mengindikasikan variabel Kompensasi, Kompetensi, dan *Good Government Governance* mempengaruhi 61,8% variabel Pencegahan *Fraud*.

Uji Statistik t

Penggunaan uji statistik t mengindikasikan penjelasan besaran variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 10
Hasil Uji Statistik t (Persamaan 1)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	128.999	15.626		8.255	<.001
	Kompensasi	-.925	.357	-.465	-2.595	.012
	Kompetensi	.440	.374	.211	1.178	.244

a. Dependent Variable: Good Government Governance

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

1. Variabel Kompensasi menunjukkan nilai t_{hitung} -2,595 dengan signifikansi yang diperoleh adalah 0,012. Menurut hasil pengujian tersebut, disimpulkan secara langsung Kompensasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *Good Government Governance*.
2. Variabel Kompetensi menyatakan nilai t_{hitung} 1,178 dengan signifikansi yang diperoleh adalah 0,244. Menurut hasil pengujian tersebut, disimpulkan secara langsung Kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap *Good Government Governance*.

Tabel 11
Hasil Uji Statistik t (Persamaan 2)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.753	4.475		2.403	.020
	Kompensasi	.001	.071	.003	.020	.984
	Kompetensi	.031	.071	.052	.432	.668
	Good Government Governance	.222	.026	.791	8.462	<.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

1. Variabel Kompensasi menunjukkan nilai t_{hitung} 0,020 dengan signifikansi yang diperoleh adalah 0,984. Menurut hasil pengujian tersebut, disimpulkan secara langsung Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Variabel Kompetensi menunjukkan nilai t_{hitung} 0,432 dengan signifikansi yang diperoleh adalah 0,668. Menurut hasil

pengujian tersebut, secara langsung Kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

3. Variabel *Good Government Governance* menunjukkan nilai t_{hitung} 8,462 dengan signifikansi yang diperoleh adalah $<0,001$. Menurut hasil pengujian tersebut, disimpulkan secara langsung Kompetensi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Uji Statistik F

Penggunaan uji F yaitu menguji semua variabel bebas terhadap variabel terikat dengan bersama-sama. Berikut merupakan hasil uji F:

Tabel 12
Hasil Uji Statistik F (Persamaan 1)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	638.996	2	319.498	3.699	.032 ^b
Residual	4405.596	51	86.384		
Total	5044.593	53			

a. Dependent Variable: Good Government Governance
b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Kompensasi

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan 1 diatas, nilai F_{hitung} sebesar 3,699 dengan tingkat probabilitas 0,032. Artinya, secara simultan Kompensasi dan Kompetensi memiliki pengaruh terhadap *Good Government Governance*.

Tabel 13
Hasil Uji Statistik F (Persamaan 2)

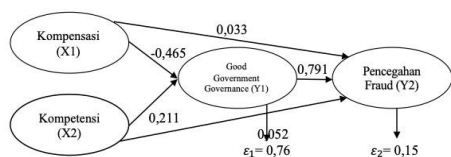
ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	245.734	3	81.911	27.016	<.001 ^b
Residual	151.600	50	3.032		
Total	397.333	53			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud
b. Predictors: (Constant), Good Government Governance, Kompetensi, Kompensasi

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan 2 diatas, nilai F_{hitung} sebesar 27,016 dengan tingkat probabilitas $<0,001$. Artinya, secara simultan Kompensasi, Kompetensi, dan *Good Government Governance* terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Analisis Jalur



Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

Gambar 2
Diagram Path Kerangka Koefisien Jalur

Nilai ϵ_1 tersebut adalah hasil dari pengurangan koefisien determinasi dengan rumus $\epsilon_1 = (1-R^2)^2$ sehingga didapat nilai $\epsilon_1 = (1-0,127)^2 = (0,873)^2 = 0,762129$. Nilai ϵ_2 juga diperoleh dari pengurangan koefisien determinasi dengan rumus $\epsilon_1 = (1-R^2)^2$, sehingga didapat nilai $\epsilon_1 = (1-0,618)^2 = (0,382)^2 = 0,145924$.

Tabel 14
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X ₁ ke Y ₂	(0,003) ² x 100% = 0,0009%		62,60%
Y ₁ ke Y ₂	(0,791) ² x 100% = 62,6%		
X ₁ ke Y ₂ melalui Y ₁		2 (0,003 x 0,791 x (-0,465)) x 100% = -0,22%	-0,22%
Pengaruh Secara Simultan			62,38
Variabel Lain			37,62
X ₂ ke Y ₂	(0,052) ² x 100% = 0,27%		62,87%
Y ₁ ke Y ₂	(0,791) ² x 100% = 62,6%		
X ₂ ke Y ₂ melalui Y ₁		2 (0,052 x 0,791 x 0,211) x 100% = 1,74%	1,74%
Pengaruh Secara Simultan			64,61
Variabel Lain			35,39

Sumber: Data output IBM SPSS 2.9 diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui variabel Kompensasi (X1) secara tidak langsung terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* (Y2) dengan *Good Government Governance* (Y1) adalah sebesar 62,38%. Kemudian, Kompetensi (X2) secara tidak langsung terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* (Y2) dengan *Good Government Governance* (Y1) adalah sebesar 64,61%. Dengan demikian Kompensasi dan Kompetensi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* melalui *Good Government Governance*.

5. SIMPULAN

Hasil dan pembahasan penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan:

1. Secara langsung variabel Kompensasi terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara langsung variabel Kompetensi tidak terdapat pengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Secara simultan Kompensasi dan Kompetensi terdapat pengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
4. Secara langsung variabel Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Secara langsung variabel Kompetensi tidak terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Secara langsung *Good Government Governance* terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Secara tidak langsung variabel Kompensasi dan Kompetensi terdapat pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* melalui *Good Government Governance* sebagai Variabel Intervening pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Budiningsih, A. N., Adisari, I., & Mubarak, D. A. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, dan Peran Auditor Internal terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *PERMANA*, 8.
- Dewata, E., Farah, E. H., Jauhari, H., & Sari, Y. (2022). Pencegahan Penipuan Dalam Pengadaan Barang dan Tata Kelola dan Pengendalian Internal yang Baik pada Layanan untuk Instansi Pemerintah. *5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*. www.kpk.go.id,
- Djalil, R. (2018). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Egita, E., & Mahfiroh, S. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Reward and Punishment dan Religiusitas Terhadap Fraud (Studi Pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20, 1–23.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731–745. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>
- Irawan. (2024, Maret 28). *ASN Inspektorat Sumsel Dituntut 2 Tahun Bui di Kasus Gratifikasi*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7266670/asn-inspektorat-sumsel-dituntut-2-tahun-bui-di-kasus-gratifikasi>.
- Jensen, & Meckling. (1976). Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost ad Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Masram, & Muah. (2017). *Manajemen Sumber Daya Profesional*. Zifatama Publisher.
- Mujanah, S. (2019). *Manajemen Kompensasi*.
- Muslih, M. (2018). Pengaruh Kompensasi Komisaris dan Direksi terhadap Laba Perusahaan, dengan Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(2), 98–109.
- Neokleous, C. I. (2017). Executive Compensation as a Corporate Governance Problem. *Essex Student Journal*, 7. <https://doi.org/10.5526/esj41>
- Nugroho, V. O. (2015). *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dengan Perilaku Etis sebagai Variabel Intervening pada PT Pagilaran*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, Pub. L. No. 108 (2017).
- Permana, B. A., Perdana, H. D., & Kurniasih, L. (2017). Determinant Of Fraud in Government Agency: Empirical Study at The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of Jakarta Representative Office. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 93. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.01.08>
- Prameswari, K. S., Ayu, P. C., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Whistleblowing, SPIP, Good Governance, dan Kompetensi terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 252–269.
- Pratiwi, F. 2. (2016). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan Dampaknya pada Kinerja Perusahaan*. Universitas Pasundan.

- Rabiultsani, S. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Risiko Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*.
- Ruhanda. (2018). Pengaruh Kompensasi dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*.
- Rukayyah, M., Wawo, A., & Sari, N. R. (2023). Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderating. *Islamic Accounting and Finance Review*, 4(1), 92–106. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>
- Sari, N., & Musmini, L. S. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, Perilaku Tidak Etis, dan Kompetensi terhadap Kecurangan Akuntansi dalam Perspektif Fraud (Studi Empiris Pada LPD se-Kecamatan Abiansemal). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 47–57.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 27). Alfabeta.
- Sunaryo, K. (2019). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 71–84. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.16031>
- Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Wafa, R., Mutia Basri, Y., & Desmiyawati, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Diatmika, I. P. G. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 14, 1.
- Wolfe, & Hermanson. (2004). The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. *CPA Journal*, 38–42.
- Yufitrianisa, Wahyuningsih, E., Apriliani, M., Shaddiq, S., Zulkarnain, I., & Anggraini, N. (2022). The Influence of Human Resource and Marketing Competence, Morality, Whistleblowing, and Internal Control System on the Prevention of Fraud in Village Financial Management in Karimun Regency. *International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science*, 11(12), 01–07. <https://doi.org/10.51583/ijltemas.2022.111201>